

Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Yang Berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Desa Betteng

Saddam Husain Tamrin¹, Muhammad Sajidin^{2*}, Nurdiah³, Fajar Rakasiwi⁴,
Anfas⁵, Bulkis⁶

^{1,3,4,5,6} Universitas Terbuka, Indonesia

² Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*muh.sajidin@unsulbar.ac.id

Received 22-07-2023

Revised 27-07-2023

Accepted 02-08-2023

ABSTRAK

Perencanaan Desa saat ini diharuskan mengacu kepada SDGs Desa. Dokumen RKP Desa adalah salah satu dokumen penting yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah desa, Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan adanya pendampingan dan memfasilitasi penyusunan dokumen RKP Desa yang berbasis SDGs Desa di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Pengabdian ini melibatkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka dan dosen Universitas Sulawesi Barat. Adapun tahapan yang dijalankan sebagai berikut 1) Persiapan dan Koordinasi dengan Pemerintah Desa; 2) Pelaksanaan sosialisasi SDGs Desa; 3) Mengadakan pelaksanaan kegiatan Focus Group Diskusi; 4) Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKP Desa yang berbasis SDGs kepada wilayah pedesaan. Berdasarkan kegiatan yang diadakan maka diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa Betteng dalam menyusun RKP desa yang berbasis SDGs Desa. Selain itu, ada harapan agar pemerintahan yang ada di desa mampu memahami bagaimana menyusun sekaligus mengaplikasikan SDGs Desa di wilayah pedesaan Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: RKP Desa; SDGs Desa; Fasilitasi

ABSTRACT

Village planning is currently required to refer to the Village SDGs. The Village RKP document is one of the important documents compiled annually by the village government. The purpose of this community service is to provide assistance or facilitate the preparation of the Village SDGs-based RKP document in Betteng Village, Pamboang District Majene Regency, This service involves collaboration between open university lecturers and students, and West Sulawesi University lecturers. with stages 1) Preparation and Coordination with the Village Government; 2) implementation of Village SDGs outreach; 3) Carry out Focus Group Discussions; 4) Facilitation of Village SDGs-based Village RKP Documents. The results obtained in this activity are expected to provide facilitation to the Betteng village government in compiling a village RKP based on Village SDGs, the village government understands how to compile and apply Village SDGs in Betteng Village, Pamboang District, Majene Regency, West Sulawesi Province.

Keywords: Village RKP; Village SDGs;

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs Desa) hadir di Indonesia untuk menciptakan kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang berkelanjutan pada semua desa yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Adanya penerapan SDGs

dilakukan untuk menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga tercipta adanya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sampai kepada generasi berikutnya. Jika mau dipahami secara mendalam, adanya aturan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan mulia untuk membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pencapaian dilakukan melalui beberapa hal strategis seperti upaya menaikkan daya saing daerah, peningkatan kapasitas masyarakat di pedesaan, pemberdayaan kelompok masyarakat dan mendorong adanya peran aktif masyarakat di pedesaan (Rahma, 2021) Dalam teknis di lapangan, berbagai upaya terpadu dan komprehensif pelaksanaan SDGs Desa terus dimassifkan oleh pemerintah desa. Mereka menginginkan agar pembangunan nasional berkelanjutan dilaksanakan mulai dari desa. Sehingga diperlukan pemahaman atas konsep pembangunan sosial lingkungan, dilengkapi pembangunan ekonomi, sosial-kemasyarakatan, ketahanan terhadap kondisi rawan bencana, ancaman terhadap demografi atau problematika kependudukan di wilayah pedesaan dan lainnya (Iskandar, 2020)

Mengacu kepada aturan nasional khususnya Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi yang berisi petunjuk dan pedoman umum, dimana hal ini menyasar kepada pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan wilayah pedesaan. Mengacu aturan yang ada tersebut, maka penerapan SDGs Desa ini dijalankan oleh pemerintah yang memiliki acuan dan arah dalam menentukan kebijakan terkait program yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan didesa dan meningkatkan kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi didesa yang optimal.

Mengacu kepada fenomena secara global, dengan melihat bagaimana pola pencegahan dan tindakan pengurangan kemiskinan selalu mengalami perubahan kebijakan. Semakin hari, kita menyaksikan bagaimana pembangunan dijalankan dengan mengacu kepada pola yang bersifat humanis dengan usaha keras membuat lingkungan hidup lebih lestari dan mengedepankan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mengutamakan pembangunan sosial yang lebih bijaksana terhadap lingkungan sekitarnya (Linggarwati, Haryanto, Miryanti, & Darmawan, 2021). Kondisi itu tentu mengalami dampak kepada program pemerintah desa yang berkaitan dengan tujuan dan hasil dari praktek SDGs Desa. Dalam mencapai apa yang dicita-citakan bersama, maka pemerintah desa berusaha melakukan pemetaan terhadap potensi di kalangan masyarakat desa dan melihat secara langsung apa yang menjadi masalah nyata di masyarakat. Pada dasarnya kondisi itu mendorong sebuah nilai positif dimana musyawarah desa menjadi tempat bertukar pikiran dan dorongan warga desa mengemukakan pendapatnya kepada pemerintah desa. Kegiatan musyawarah desa dipandang strategis karena melibatkan *stakeholders* yang berkaitan dengan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. SDGs Desa merupakan petunjuk umum bagi aparatur dan masyarakat desa dalam menciptakan kondisi pada tahap merencanakan pembangunan di pedesaan melalui

tahapan yang terpolakan dengan baik antara mengadakan pendataan dan perencanaan yang terintegrasi kepada SDGs Desa (Iskandar, 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yaitu belum terjadinya pemerataan pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur di desa, masalah lainnya juga terkait populasi, belum optimalnya pengelolaan kandungan alam secara nasional, termasuk kita perlu memperhatikan secara serius terhadap berkumpulnya sumber daya ekonomi agar kita mampu mencapai tujuan besar bonus demografi yang dihadapi Indonesia saat ini (Wisnumurti & Darma, 2018). Mengacu kepada dokumen yang ada, kita dapat melihat secara umum variabel perdamaian dunia, planet, manusia, kemitraan, dan peningkatan kesejahteraan manusia sebagai misi penting SDGs di 2030 dimana persoalan berkaitan perubahan iklim, kesetaraan sesama manusia dan kemiskinan global dapat berakhir sesuai harapan kita bersama (Raharjo, 2016)

Penerapan SDGs Desa di Indonesia memiliki beberapa poin strategis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat antara lain bagaimana mengatasi kemiskinan desa, mengurangi kelaparan di tingkat desa, mendorong adanya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pendidikan pada warga desa, mengajak kontribusi aktif kelompok perempuan desa, menciptakan kelayakan sanitasi dan air yang bersih di desa, menciptakan energi terbarukan dan berkualitas yang bersih di desa, menciptakan komunitas warga desa yang peduli lingkungan kelautan, mengupayakan warga desa memperhatikan lingkungan darat, mendukung upaya perdamaian dan keadilan di desa, membangun upaya kemitraan pembangunan di pedesaan, membentuk kelembagaan dinamis di desa, dan mendukung kebudayaan yang adaptif di pedesaan. (Iskandar, 2020).

Di Indonesia, penyelesaian masalah warga desa dengan pemerintah desa dilakukan dengan melakukan optimalisasi terhadap berbagai sumber daya potensial yang ada di desa tersebut. Kehadiran SDGs akan membantu pemerintah desa setempat dalam melihat permasalahan yang ada secara nyata. Selain itu, berbagai potensi dan masalah yang ada dapat dilakukan pemetaan terhadap program desa yang dikaitkan dengan SDGs Desa. Hal ini penting agar dalam menyusun dokumen rencana kerja pemerintah desa baik RKP dan RPJM mampu menyesuaikan kebutuhan di masyarakat desa. Konteks ini, pemerintah desa perlu mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan agar penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat menghasilkan produk akhir berbentuk dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan memiliki kualitas hasil yang tinggi (Suroso, Hakim, & Noor, 2014)

Pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan desa tidak bisa berjalan sendirian, sehingga membutuhkan adanya partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan rencana kerja pemerintah desa khususnya dalam menyajikan informasi dan proses komunikasi aktif di wilayahnya. Ini penting agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Partisipasi masyarakat

dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di desa akan membuat masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan desa sebagaimana banyak terjadi beberapa tahun terakhir ini. Bentuk partisipasi masyarakat juga akan mendorong masyarakat desa untuk merasakan jiwa kepemilikan terhadap kondisi desanya dan ikut bertanggung jawab mulai dari proses merencanakan sampai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa secara nyata di lapangan (Sutrisna, 2021)

Berdasarkan hasil observasi awal tim ke kantor pemerintah desa betteng salah satu desa di kecamatan pamboang kabupaten majene menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan atau RKP Desa yang mengacu kepada SDGs Desa, pemahaman yang terbatas terkait kebijakan dan mekanisme dikarenakan minimnya informasi dan proses transformasi kebijakan yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah desa, sangat perlu untuk memberikan pendampingan secara khusus dari akademisi untuk membantu dalam menyusun dokumen perencanaan RKP Desa yang berbasis SDGs kepada pemerintah desa betteng, diharapkan dengan adanya fasilitasi atau pendampingan dari akademisi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut, akan tersusun dokumen perencanaan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa di desa betteng. Selain itu nantinya pemerintah desa betteng akan memahami proses siklus pembangunan di desa dari mulai pendataan, perencanaan, penganggaran, pertanggung jawaban dan monitoring evaluasi dari program yang dilaksanakan secara umum, khususnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait penyusunan dokumen perencanaan desa.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dijalankan dengan rentang waktu yang terukur. Dimulai pada 11 Mei 2023, kemudian diakhiri pada 15 September 2023. Bertempat di Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam menjalankan kegiatan ini dipakai pendekatan dengan bertatap muka secara langsung. Agar kegiatan berjalan sukses, maka dijalankan dengan empat tahapan penting meliputi kegiatan pelaksanaan penyebaran informasi atau sosialisasi dengan menyertakan aparatur desa baik pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga yang ada di masyarakat Desa Betteng. Adapun waktu pelaksanaan dijalankan pada 11 Mei 2023; 2) *Focus Group Discussion* bersama Tim 11 atau Tim Penyusun RKP Desa di desa betteng 19 Mei 2023; 3) Fasilitasi penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa di desa Betteng tanggal 20 juni – 20 September dan 4) Penyusunan Laporan Hasil Analisis pada tanggal 21-25 September 2023.

Konsep awal kegiatan ini berasal dari pertemuan awal peneliti dengan aparatur Desa Betteng. Saat pertemuan itu, diketahui bahwa umumnya belum ada pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan SDGs Desa pada pemerintah Desa Betteng. Mereka selama ini belum mendapatkan informasi yang cukup bahwa pemerintah pusat mendorong agar program dan kegiatan di desa harus mengacu kepada sumber pendanaan dari dana desa yang sudah disediakan pemerintah pusat. Selain itu

kebijakan desa seharusnya berpedoman kepada SDGs Desa. Masalah lainnya adalah masih minimnya kapasitas sumberdaya manusia unsur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam menafsirkan kebijakan dan keterbatasan informasi yang didapatkan. Salah satu hasil penemuan penting dalam kegiatan yang menyasar kepada masyarakat ini yaitu pentingnya untuk memfasilitasi penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat di Desa Betteng.

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pemberian materi dan diskusi interaktif. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk pendampingan atau fasilitasi penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada pemerintahan desa dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) di Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti mengharapkan hasil dari pendampingan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat khususnya Tim 11 yang menyusun RKP Desa dalam menerapkan SDGs Desa kepada dokumen perencanaan RKP Desa. Agar tujuan itu tercapai dan menghasilkan kebermanfaatan yang lebih luas, maka langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendiskusikan rencana kegiatan pengabdian masyarakat dan meminta izin untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi;
2. Menyelenggarakan sosialisasi, yaitu dengan materi: a) SDGs Desa Sebagai Arah pembangunan Desa; dan b) Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa.
3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* bersama Tim 11 atau Tim Penyusun RKP Desa terkait langkah-langkah dalam penyusunan RKP Desa.
4. Melakukan Pendampingan Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada Tim 11.
5. Menyusun Laporan Hasil Analisis Kegiatan Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa.

HASIL KEGIATAN

Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan desa adalah sebuah proses dalam rangka mengoptimalkan kerja pemerintah desa. Dalam perencanaan desa ada dua hal yang harus disusun yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sebagai dokumen strategis mengenai apa pekerjaan strategis berbentuk misi, arah dan strategi pembangunan selama enam tahun yang akan dilakukan di desa; (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan dokumen yang berisikan penjelasan dari RPJM Desa selama setahun.

Dalam menyusun dokumen ini, kita bisa mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 yang berisikan penjelasan secara umum mengenai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di desa. Dalam aturan hukum tersebut dimuat penjelasan tentang panduan

bagi pemerintah desa dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pendataan. Hal ini akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembangunan yang akan dijalankan di desa tersebut. Pendataan sangat penting karena menjadi dasar atau acuan pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan, sehingga arah tujuan pembangunan di desa bisa diukur capaian keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa khususnya terkait permasalahan kemiskinan.

Pedoman itu juga akan membantu untuk melihat secara tajam bagaimana arah kebijakan dalam merencanakan pembangunan di pedesaan yang mampu menyesuaikan situasi objektif desa, pemerintah desa akan mudah dalam menganalisis perencanaan desa yang berdasarkan kepentingan masyarakat desa, sehingga apa yang menjadi program dan kegiatan pemerintah desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, selain itu dalam upaya memaksimalkan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian SDGs Desa, dimana SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa SDGs Desa harus dijadikan petunjuk utama untuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat di desa tersebut dalam membentuk arah kebijakan pemberdayaan dan pembangunan desa yang selaras dengan kebutuhan, harapan dan aspirasi masyarakat desa. Hal ini dapat dimulai oleh pemerintah Desa dengan menyusun peta jalan SDGs Desa yang memuat gambaran kondisi objektif apa yang sudah dicapai oleh SDGs Desa, siapa saja sasaran SDGs Desa, apa saja persoalan dan sejauhmana solusi yang sudah dijalankan dalam mencapai tujuan dari SDGs Desa. Perlu juga diperdalam sejauhmana sumber daya dan potensi Desa dapat dimaksimalkan untuk mencapai target dari SDGs Desa. Terakhir perlu dibuat rancangan program apa yang efektif dan efisien dalam membangun desa ke depannya.

Prinsip dasar dari merencanakan desa yang berbasis SDGs Desa adalah bagaimana muncul aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa. Bagaimanapun masyarakat perlu diajak secara aktif dan diberikan ruang berekspresi dan menyampaikan pandangan dalam proses perencanaan sehingga kemampuan bergotong royong dan berswadaya masyarakat dapat meningkat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, program dan strategi mengatasi persoalan kemiskinan di desa perlu dilaksanakan secara bertahap, melibatkan banyak pihak sehingga partisipasi lebih luas dan pembangunan berjalan secara berkelanjutan serta berkesinambungan (Latifah, Wibowo, & Widiyanto, 2022).

Masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan desa harus diajak untuk melakukan pendataan dan perencanaan. Adapun unsur masyarakat desa ini meliputi kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, tokoh pendidikan, tokoh seni dan

budaya, dan keterwakilan wilayah, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok difabel, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok pemerhati lingkungan, tokoh adat, kelompok pemuda, dan organisasi sosial lainnya. Keterlibatan masyarakat tersebut agar pemerintah desa dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga tercapai secara tepat sasaran terhadap program di desa tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan pendampingan atau fasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berbasis SDGs Desa di desa Betteng kecamatan Pamboang kabupaten Majene, dilakukan dengan beberapa tahap, yang pertama yaitu dilaksanakannya sosialisasi terkait SDGs Desa kepada pemerintah desa Betteng, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Betteng, Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa Betteng, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani dan Kelompok Pemuda di desa Betteng. Materi SDGs Desa yang disampaikan terkait pentingnya arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis SDGs Desa. Pengetahuan tentang program SDGs akan mampu melahirkan perubahan besar khususnya pada persoalan pembentukan persepsi masyarakat, sehingga akan tumbuh minat dan antusias melaksanakan program SDGs Desa (Latifah, Wibowo, & Widiyanto, 2022).



Gambar 1. Pemberian Materi SDGs Desa

Pemberian Materi SDGs Desa merupakan sebagai upaya pemerintah desa dan semua *stakeholder* di desa Betteng memahami terkait SDGs Desa yang harus di implementasikan di desa, khususnya tim 11 yaitu tim yang menyusun RKP Desa, Tim 11 dipilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan melalui SK Kepala Desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa sangat penting agar pembangunan lebih aspiratif sehingga apa yang nanti akan dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat (Fathurrahman, 2013). Pembentukan Tim penyusun RKP Desa merupakan tahapan awal dalam penyusunan RKP Desa, tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam menyusun RKP Desa yaitu pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan pembiayaan pembangunan desa, biasanya pagu

indikatif desa dikeluarkan oleh bupati, itu menjadi gambaran dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa betteng. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh Tim Penyusun RKP desa yaitu pencermatan ulang RPJM Desa, tujuannya adalah agar terjadi penyelerasan program kegiatan yang sudah tertera dalam rancangan kegiatan RPJM Desa. Setelah itu tim penyusun mulai menyusun rancangan RKP Desa dengan membuat daftar usulan RKP Desa yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun depan.



Gambar 2. Musyawarah Tim Penyusun RKP Desa (Tim 11)

Penyusunan RKP berbasis SDGs Desa yang dilakukan oleh sebuah tim, dimana mereka bekerja agar kegiatan yang dibuat masuk dalam rancangan RKP Desa dan mampu menyesuaikan dengan standar yang ada khususnya terhadap 18 Indikator pada Program SDGs Desa. Musyawarah Tim 11 merupakan salah satu upaya dalam menyamakan persepsi dan penyusunan RKP Desa, selanjutnya adalah perlu mengupayakan adanya penyesuaian program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi mulai dari sektor pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pemerintahan yang sifatnya saling terintegrasi dengan berpedoman kepada standar yang sudah ditetapkan SDGs Desa. Untuk menjalankannya misalnya pada SDGs nomor pertama yaitu melahirkan desa yang tanpa kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di desa (SDGs Desa nomor dua). Selama ini diketahui bahwa Pemerintah Desa Betteng juga sudah mengaplikasikannya dengan merencanakan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, Program Padat Karya Tunai dan melaksanakan pendayagunaan potensi desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu membangun tempat wisata di desa betteng. Untuk pengaplikasian dari Desa Peduli Kesehatan yang berkenaan dengan SDGs ketiga yaitu Desa peduli Sehat dan mencapai hidup Sejahtera. Selain itu juga Desa yang layak terhadap sanitasi dan air bersih sesuai SDGs nomor 6, serta kepedulian akan desa dengan wilayah bermukim di desa yang aman dan nyaman sesuai amanat SDGs ke 11. Pemerintah Desa Betteng selalu berusaha merencanakan

kegiatan pembangunan dengan membangun gedung posyandu dan pembangunan sarana air bersih serta pemberian makanan tambahan bagi balita yang terindikasi *stunting*.

Selain itu untuk mengaplikasikan SDGs ke empat yaitu Desa Peduli Pendidikan, pemerintah desa Betteng mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung PAUD dan bantuan sarana prasarana perpustakaan desa betteng. Kemudian dalam upaya mengaplikasikan SDGs kelima yaitu Desa Ramah Perempuan, pemerintah desa betteng dalam penyusunan perencanaan RKP Desa ini dengan menyertakan keterlibatan perempuan desa dalam berbagai kegiatan desa, serta meningkatkan keterampilan perempuan seperti menjahit dan pengolahan produk unggulan desa betteng yaitu olahan dari buah nanas. Untuk pengaplikasian SDGs Desa selanjutnya dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Desa yang Peduli kepada Lingkungan khususnya program Desa Energi Bersih dan Terbarukan di SDGs ketujuh, Desa yang Tanggap terhadap Perubahan Iklim pada SDGs ketiga belas. Selain itu fokus lainnya Desa Peduli Lingkungan Darat dan Laut, sesuai amanat SDGs keempat belas dan kelima belas. Dalam hal ini sesungguhnya pemerintah desa Betteng selalu didorong agar mampu merencanakan untuk program kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan melakukan rehabilitasi lahan gambut milik desa yang nantinya akan menjadi lahan produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu kepada hasil kegiatan pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di desa Betteng terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dokumen perencanaan RKP Desa merupakan salah satu dokumen penting yang harus disusun oleh pemerintah desa tanpa terkecuali desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Perencanaan Desa saat ini harus mengacu kepada SDGs Desa, dimana SDGs Desa menjadi salah satu usaha membangun desa secara berkelanjutan yang menuntut pemerintah desa mampu melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang kemajuan ekonomi dan sosial desa pada setiap tahunnya, khususnya program kegiatan dengan sumber yang berasal dari alokasi dana desa. Perguruan tinggi sebagai insan akademis dalam melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat dapat memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa Betteng dalam menyusun RKP desa yang berbasis SDGs Desa, pemerintah desa menjadi memahami bagaimana menyusun sekaligus mengaplikasikan SDGs Desa di desa Betteng, sehingga dengan adanya RKP Desa yang berbasis SDGs Desa ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa betteng terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan di desa.

Saran

Mengacu kepada hasil akhir kegiatan mengabdikan kepada masyarakat ini. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk pedoman kedepannya sebagai berikut 1) Pemerintah desa terus menjalin hubungan harmonis dengan elemen atau stakeholder terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan di desa. 2) Adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tahapan yang ada dimulai dari mendata, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa. 3) Meningkatkan kapasitas Tim 11 yang bertugas melakukan penyusunan dokumen RKP Desa yang berbasis SDGs Desa. dan 4) Memperkuat komitmen kolektif para stakeholder khususnya pemerintah desa dan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa sehingga berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan hasilnya dicapai dengan proses musyawarah mufakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan semua pihak. Sehingga peneliti mengucapkan banyak terima kasih terhadap LPPM Universitas Terbuka yang memberikan dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui Dana DIPA Universitas Terbuka Tahun 2023. Selain itu juga, peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Pemerintah Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dimana aparat pemerintah desa banyak memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai judul yang diusulkan selama waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurrahman, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kota baru tengah . *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial politik* , 39-47.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latifah, H., Wibowo, A., & Widiyanto. (2022). Dampak Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di desa Jhunot, Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 1-9). Yogyakarta: LP2M UST Jogja.
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs Di desa pandak, kecamatan baturraden, kabupaten banyumas. *Pengembangan Sumber daya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan XI* (pp. 361-368). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Raharjo, I. &. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Social Work Journal* , 154-272.

- Rahma, N. A. (2021). Kemampuan Masyarakat dalam mengungkap potensi desa (sebuah aksi partisipatorif dalam perencanaan desa wisata di desa tritik, Nganjuk). *Jurnal Care*, 82-90.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa banjaran kecamatan driyorejo kabupaten gresik. *Wacana*, 7-16.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permuswaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Cakrawarti*, 1-10.
- Wisnumurti, A. A., & Darma, I. &. (2018). Government Policy Of Indonesia to managing demographic Bonus ana Creating Indonesua Gold In 2045. *Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23-34.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa